

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian, departemen kerjanya mempunyai tugas di departemen pertanahan, yaitu, kantor regional Administrasi Pertanahan Nasional di setiap provinsi, kabupaten dan kota bertanggung jawab atas pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar pendaftaran tanah total. Badan ini didirikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988. Tugasnya membantu Presiden dalam mengatur dan membina pemerintahan. per tanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundangundangan lainnya antara lain mengatur penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden, penguasaan hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah tanah.

Tugas utama Badan Pertanahan Nasional adalah membantu presiden dalam pengelolaan dan pengembangan pengelolaan pertanahan sesuai dengan UndangUndang Dasar Pertanian dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan tersebut meliputi penguasaan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah serta peraturan lainnya yang terkait dengan masalah pertanahan berdasarkan peraturan presiden. Tujuan pembangunan bidang pertanahan adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat guna mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan merata material dan spiritual.

Pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diuraikan secara jelas definisi pendaftaran tanah yaitu, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, terus menerus dan teratur, termasuk pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian dan pemeliharaan data fisik dan hukum terkait persil tanah dan rumah susun dalam bentuk peta dan daftar, termasuk penerbitan surat dan sertifikat hak atas bidang tanah, Sudah ada hak dan kepemilikan unit dan hak-hak tertentu yang dikenakan padanya.

Masalah yang terdapat dalam proses pembuatan sertipikat tanah yaitu sebagai berikut ,pertama masyarakat harus menyiapkan berkas yang di gunakan guna untuk melengkapi

persyaratan administrasi pengajuan sertipikat tanah, setelah itu masyarakat harus menunggu antrian untuk mendaftar . Hal ini dapat mengakibatkan lamanya proses pendaftaran pembuatan sertipikat tanah. Oleh sebab itu peneliti melakukan analisis terhadap Manajemen Layanan Teknologi Informasi di Kantah ATR/BPN Kab Purbalingga menggunakan ITIL V3 Domain Service Design.

B. Tujuan

Tujuan dari pembuatan Analisis Manajemen Layanan Teknologi Informasi pada Kantah ATR/BPN Badan Pertanahan Nasional wilayah Purbalingga :

1. Mengukur tingkat keberhasilan dalam pemanfaatan teknologi informasi ini di Kantah ATR/BPN Kab Purbalingga
2. Merekomendasikan fitur baru di dalam website KKP, yaitu fitur Input data secara online.

C. Ruang Lingkup

Pada Ruang lingkup kerja praktik penulis di ATR/BPN Badan Pertanahan Nasional adalah pada difisi *Infrastruktur Pengukuran*. Pada divisi pengukuran, penulis mempunyai tugas pokok yang dikerjakan selama kerja praktik, yaitu melakukan validasi pada pemberkasan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.terdapat dua tools untuk melakukan input data Sertipikat Tanah yaitu pada website Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dan YURIDIS

D. Aspek Umum dan Kelembagaan

1. Profil Badan Pertanahan Negara di Purbalingga

Badan Pertanahan Nasional (disingkat **BPN**) adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan *Kantor Pertanahan Agraria Tata Ruang* / BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.

Reforma Agraria yang masuk ke dalam nawacita Presiden Republik Indonesia merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, namun juga

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Tujuan akhir dari Reforma Agraria adalah memakmurkan rakyat dan bagaimana memberdayakan masyarakat yang basisnya adalah pemilikan penguasaan tanah," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN **Struktur Organisasi Badan Pertanahan Negara di Purbalingga.**

Struktur organisasi pada Badan Pertanahan Negara di Purbalingga adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan pertanahan Negara di Purbalingga

2. Visi Misi Badan Pertanahan Negara

a. Visi

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. **b. Misi**

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk :

- Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
- peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

- Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
- Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Memperkuat lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

E. Metode Penulisan Laporan

1. Metode Studi Literatur

Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat laporan perancangan dan pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka penulis lakukan dengan cara membaca berbagai macam sumber literatur seperti jurnal dan dokumen lainnya yang dapat mendukung dan juga menambah wawasan penulis. Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca jurnal dan Teori internet yang mendukung dan menunjang dalam pembuatan penyusunan laporan, sekaligus dijadikan sebagai landasan dalam penulisan laporan .

2. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan para beberapa karyawan BPN. Kemudian para Karyawan akan menjelaskan sistem yang digunakan dari fungsi di dalam web KKP

3. Metode Penyebaran Kuisisioner

Metode Penyebaran kuisisioner dilakukan dengan cara penulis akan membuat sebuah kuisisioner berupa beberapa pertanyaan terkait sistem yang akan disebarkan kepada karyawan yang BPN. Kuisisioner ini guna untuk mengukur tingkat kematangan sistem KKP berbasis Website yang menggunakan framework Information Technology Infrastructure Library (ITIL) versi 3 pada sub domain service design

F. Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mendapat hasil penulisan yang tersusun secara sistematis maka penulis membagi dalam 4 (empat) bab yaitu :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, aspek umum dan kelembagaan, metode penulisan laporan, dan sistematika penulisan laporan.

Bab II : Merupakan bsgisn ysng berisi landasan teori. Berisi tentang sistem dan informasi,

Bab III : Merupakan analisa dan pembahasan. Yang Berisi tentang pekerjaan / kegiatan, serta analisis dan pembahasan hasil pekerjaan.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian.